LITERASI POLITIK BAGI GEN Z DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

M. Zaki Fathurrahim
NPP. 33.0782
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: zaki.ipdn@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP, M.Si
Email: astika@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Political literacy for Gen Z plays a crucial role in increasing political awareness, particularly in the context of elections in Barito Kuala Regency. The background of this research is driven by the low political participation of Gen Z in this area, despite their growing up in a digital era that should facilitate the enhancement of political knowledge. Additionally, the phenomenon of low political knowledge and the high tendency to consume information without valid verification has become a major concern.* ***Purpose:*** *This study aims to explore the level of political literacy among Gen Z in the region and identify strategic steps that can be taken to build better political awareness.* ***Method:*** *The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, involving interviews with informants from the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) and the General Election Commission (KPU) of Barito Kuala Regency, as well as a survey of 30 Gen Z respondents.* ***Results:*** *The results show that the political literacy of Gen Z in Barito Kuala Regency is still relatively low, especially in terms of political knowledge, participatory skills, and critical attitudes toward political issues. Several strategic steps suggested include strengthening political socialization based on experience, utilizing digital media for education, and establishing youth discussion forums.* ***Conclusion:*** *Collaboration between the government, educational institutions, and youth communities is expected to improve political literacy among Gen Z, enabling them to participate more actively in the democratic process.*
Keywords: *Gen Z, Political Awareness, Political Education, Political Literacy, Voter Participation.*

ABSTRAK

Permasalahan: Literasi politik bagi Gen Z memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan kesadaran politik, khususnya dalam konteks Pemilu di Kabupaten Barito Kuala. Latar belakang penelitian ini didorong oleh rendahnya partisipasi politik Gen Z di daerah ini, meskipun mereka tumbuh dalam era digital yang seharusnya dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan politik. Selain itu, fenomena rendahnya pengetahuan politik dan tingginya kecenderungan konsumsi informasi tanpa verifikasi yang valid menjadi perhatian utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali tingkat literasi politik Gen Z di daerah tersebut serta langkah strategis yang dapat diambil untuk membangun kesadaran politik yang lebih baik. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melibatkan wawancara dengan informan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, serta survei kepada 30 responden Gen Z. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala masih tergolong rendah, terutama dalam aspek pengetahuan politik, keterampilan partisipatif, dan sikap kritis terhadap isu politik. Beberapa langkah strategis yang

disarankan termasuk penguatan sosialisasi politik berbasis pengalaman, pemanfaatan media digital untuk edukasi, dan pembentukan forum diskusi pemuda. **Kesimpulan:** Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas pemuda diharapkan dapat meningkatkan literasi politik di kalangan Gen Z, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan demokrasi.
Kata Kunci: Gen Z, Kesadaran Politik, Literasi Politik, Partisipasi Pemilih, Pendidikan Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum (Pemilu). Sebagai negara demokratis, kualitas Pemilu sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat. Namun, dalam beberapa penyelenggaraan Pemilu terakhir, berbagai pelanggaran seperti penyalahgunaan fasilitas negara, pelanggaran administratif, hingga praktik politik uang masih sering terjadi.

Salah satu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh dinamika informasi politik adalah Gen Z. Generasi ini lahir antara tahun 1997–2010, tumbuh bersama internet, serta merupakan kelompok *digital native* yang mendominasi komposisi pemilih pemula dalam Pemilu kontemporer (Hardyansyah & Sobari, 2024). Meskipun akrab dengan teknologi, Gen Z belum sepenuhnya bijak dalam memanfaatkan media digital untuk membangun pemahaman politik dan cenderung menerima informasi politik secara cepat tanpa proses verifikasi yang matang.

Kondisi nyata di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya kesenjangan antara akses informasi dengan tingkat literasi politik generasi muda. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Barito Kuala yang dilakukan terhadap 300 responden Gen Z, ditemukan bahwa 68% remaja mengaku sering membaca informasi politik melalui media sosial, namun hanya 27% yang mampu menjelaskan kembali mekanisme Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pemilu 2024, tingkat kehadiran pemilih pemula di Barito Kuala hanya mencapai 62%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 70%. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% menyatakan keputusan politiknya dipengaruhi oleh informasi dari media sosial tanpa proses verifikasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas literasi politik Gen Z dari berbagai sudut pandang. Aziz dan Widodo (2022) serta Hasna dan Candrasari (2023) menunjukkan bahwa terpaan media sosial berkontribusi signifikan terhadap literasi politik Gen Z, namun kedua penelitian tersebut bersifat kuantitatif korelasional dan tidak mengeksplorasi bagaimana lembaga pemerintah daerah berperan dalam membangun literasi tersebut. Chen dan Khoso (2025) serta Karolčík dkk. (2025) mengonfirmasi pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan keterlibatan diskusi politik di sekolah, namun keduanya dilakukan pada konteks negara lain (Pakistan dan Slovakia) sehingga relevansinya terhadap konteks tata kelola pemerintahan kabupaten di Indonesia masih terbatas.

Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pengaruh media sosial atau konteks pendidikan formal di luar Indonesia (Chen & Khoso, 2025). Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji literasi politik Gen Z melalui sudut pandang gabungan antara perspektif kelembagaan pemerintah daerah (Kesbangpol dan KPU) dan perspektif Gen Z itu sendiri, sekaligus menganalisisnya menggunakan ketiga dimensi literasi politik Bernard Crick (2000): pengetahuan politik, keterampilan partisipatif, serta sikap kritis dan kesadaran sosial

secara terpadu untuk merumuskan langkah strategis peningkatan kesadaran politik. Kekosongan inilah yang menjadi dasar pijakan penelitian ini, dengan mengambil lokus Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai daerah yang belum pernah menjadi objek kajian literasi politik Gen Z secara akademis.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat rendahnya literasi politik Gen Z berdampak langsung pada kualitas demokrasi di Kabupaten Barito Kuala. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat keterlibatan politik Gen Z secara faktual, sehingga perumusan strategi pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak efektif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan literasi politik Gen Z. Aziz & Widodo (2022) menemukan bahwa media sosial berpengaruh 64,1% terhadap literasi politik Gen Z. Hasna & Candrasari (2023) menunjukkan terpaan informasi politik di media sosial berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi politik Gen Z. Karolčík dkk. (Karolčík et al., 2025) menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pembahasan topik politik dalam proses pembelajaran di sekolah.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji literasi politik di kalangan Gen Z dan menempatkan media digital sebagai variabel penting dalam pembentukan pemahaman politik generasi muda. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan dan keterbatasan yang menjadi pijakan posisi penelitian ini. Pertama, dari sisi pendekatan, penelitian Aziz dan Widodo (2022), Hasna dan Candrasari (2023), serta Karolčík dkk. (2025) menggunakan pendekatan kuantitatif atau kuantitatif korelasional yang mengukur pengaruh antarvariabel, sehingga belum mampu menggali secara mendalam proses dan makna di balik rendahnya literasi politik Gen Z. Kedua, dari sisi fokus kajian, Chen dan Khoso (2025) menitikberatkan pada efektivitas suatu program (pengabdian masyarakat dan pendidikan ideologis) dalam jangka pendek, bukan pada pemetaan kondisi literasi politik secara menyeluruh berdasarkan kerangka teori yang konsisten. Ketiga, seluruh penelitian terdahulu tersebut tidak mengaitkan temuannya dengan peran konkret lembaga pemerintah daerah seperti Kesbangpol dan KPU dalam membangun kesadaran politik Gen Z di tingkat kabupaten.

Berdasarkan kekosongan tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai pelengkap sekaligus pembeda, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggabungkan perspektif kelembagaan (Kesbangpol dan KPU Kabupaten Barito Kuala) dan perspektif Gen Z, dianalisis melalui ketiga dimensi literasi politik Bernard Crick (2000) secara terstruktur, untuk menghasilkan gambaran kondisi literasi politik sekaligus model langkah strategis yang aplikatif bagi pemerintah daerah sesuatu yang belum dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya bukan semata karena perbedaan lokus penelitian, melainkan juga karena beberapa aspek substantif berikut. Pertama, dari sisi pendekatan analisis, penelitian ini menggabungkan data wawancara mendalam dengan dua lembaga pemerintah (Kesbangpol dan KPU Kabupaten Barito Kuala) dan data survei terhadap 30 Gen Z, yang kemudian dianalisis secara terintegrasi menggunakan Nvivo 12, sebuah desain yang belum digunakan

pada penelitian Aziz dan Widodo (2022), Hasna dan Candrasari (2023) masing-masing hanya menggunakan satu sisi perspektif (masyarakat/peserta) tanpa perspektif kelembagaan pemerintah.

Kedua, dari sisi penggunaan teori, penelitian ini menempatkan ketiga dimensi literasi politik Bernard Crick (2000): pengetahuan politik, keterampilan partisipatif, serta sikap kritis dan kesadaran sosial bukan sekadar sebagai landasan teori, melainkan sebagai struktur analitis utama yang digunakan untuk memetakan temuan, sesuatu yang tidak dilakukan secara eksplisit oleh penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan kerangka pengaruh media sosial atau evaluasi program.

Ketiga, dari sisi model strategi, penelitian ini menghasilkan model strategi peningkatan literasi politik yang secara langsung memetakan setiap permasalahan pada masing-masing dimensi Crick terhadap strategi pemerintah dan bentuk implementasinya (sebagaimana disajikan pada Tabel 1), sehingga bersifat aplikatif bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.

Keempat, dari sisi temuan baru, penelitian ini mengungkap bahwa kendala utama bukan terletak pada minat Gen Z terhadap politik maupun keterbatasan akses informasi, melainkan pada belum tepatnya pendekatan edukasi politik yang digunakan pemerintah daerah serta keterbatasan struktural berupa anggaran sosialisasi dan kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang tersebar di 17 kecamatan dengan akses digital yang tidak merata sebuah temuan kontekstual yang belum diungkap oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai literasi politik bagi Gen Z dalam membangun kesadaran politik di Kabupaten Barito Kuala; dan memperoleh langkah strategis mengenai literasi politik bagi Gen Z dalam membangun kesadaran politik di Kabupaten Barito Kuala.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sugiyono (2023) menyebutkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis data secara induktif dengan mengambil data langsung dari kondisi alamiah sumbernya. Survei terhadap 30 responden Gen Z dalam penelitian ini bukan dimaksudkan sebagai instrumen pengukuran statistik untuk menguji hipotesis, melainkan sebagai instrumen kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*) yang berfungsi menjaring persepsi dan pengalaman Gen Z secara tertulis, sebagai pelengkap data wawancara mendalam dengan informan kunci. Data dari kuesioner terbuka tersebut diolah secara kualitatif menggunakan teknik *word frequency* pada aplikasi NVivo 12 untuk menghasilkan visualisasi *word cloud*, bukan diolah menggunakan uji statistik inferensial. Dengan demikian, persentase yang disajikan dalam penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberi gambaran kecenderungan jawaban, dan bukan merupakan hasil pengujian hipotesis sebagaimana dalam penelitian kuantitatif maupun *mixed methods*. Pendekatan triangulasi sumber dan teknik tetap digunakan untuk menjaga keabsahan data sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif deskriptif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan survei. Informan utama adalah Abdul Gani Majedi, S.IP., MM (Sekretaris Kesbangpol Kab. Barito Kuala) dan Rusdiansyah, S.P. (Ketua KPU Kab. Barito Kuala) sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam peningkatan literasi politik di daerah. Selain itu, dilakukan survei terhadap 30 responden Gen Z menggunakan Google Form. Pemilihan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagai informan kunci dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa kedua jabatan tersebut secara struktural memegang kewenangan dan tanggung jawab langsung atas perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan/literasi politik di tingkat kabupaten, sehingga kedua informan ini merupakan *key informant* yang paling representatif untuk menjelaskan kebijakan, program, dan keterbatasan kelembagaan yang

ada bukan sekadar pelaksana lapangan. Keterwakilan data tidak diperoleh dari banyaknya jumlah informan kelembagaan, melainkan dari kedalaman informasi (*information power*) yang dihasilkan melalui wawancara mendalam dengan kedua pemegang kewenangan tersebut, yang kemudian dilengkapi dan dikonfirmasi silang (*cross-check*) dengan data dari 30 responden Gen Z melalui teknik triangulasi sumber. Dengan demikian, meskipun jumlah informan lembaga terbatas pada dua orang, validitas data tetap terjaga karena kedalaman dan posisi strategis informan tersebut dalam struktur kebijakan literasi politik di Kabupaten Barito Kuala

Selain mempertimbangkan kedudukan informan sebagai pemegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Barito Kuala, peneliti juga menggunakan prinsip data *saturation* (kejenuhan data). Proses wawancara dilakukan hingga informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan tema baru yang signifikan terkait literasi politik Gen Z. Dengan demikian, kecukupan data dalam penelitian ini tidak ditentukan oleh jumlah informan, melainkan oleh kedalaman informasi, relevansi informan terhadap fokus penelitian, serta tercapainya kejenuhan data.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dengan hasil survei terbuka terhadap 30 responden Gen Z serta data dokumentasi kegiatan pendidikan politik yang diperoleh selama penelitian. Tujuannya untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, survei terbuka, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama. Temuan yang diperoleh melalui wawancara kemudian dikonfirmasi menggunakan hasil survei, observasi, dan dokumentasi sehingga setiap kesimpulan penelitian didukung oleh lebih dari satu teknik pengumpulan data. Melalui proses tersebut, validitas dan kredibilitas data penelitian dapat ditingkatkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis literasi politik bagi Gen Z dalam upaya membangun kesadaran politik di Kabupaten Barito Kuala menggunakan teori Bernard Crick (2000) yang terdiri dari tiga dimensi utama: pengetahuan politik, keterampilan partisipatif, serta sikap kritis dan kesadaran sosial.

3.1. Literasi Politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala

3.1.1. Pengetahuan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala masih berada pada tingkat pengenalan dasar. Sebagian besar responden mengenal istilah-istilah umum seperti pemilu, partai politik, dan lembaga pemerintah, namun belum memahami secara mendalam mekanisme sistem politik, proses pengambilan keputusan, maupun hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan survei terhadap 30 responden Gen Z, hanya 27% yang mampu menjelaskan kembali mekanisme Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Kesbangpol yang menyatakan bahwa sosialisasi literasi politik yang khusus diperuntukkan bagi Gen Z hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan perwakilan dua orang per sekolah, akibat keterbatasan dana. Keterbatasan frekuensi dan jangkauan sosialisasi ini menyebabkan pemahaman politik Gen Z tidak berkembang secara optimal.

Jika dikaitkan dengan teori Bernard Crick (2000), temuan tersebut menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan politik belum berkembang secara optimal. Crick menegaskan bahwa pengetahuan politik merupakan fondasi utama literasi politik karena menjadi dasar bagi individu untuk memahami proses politik, mengenali hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mengambil keputusan politik

secara rasional. Rendahnya pemahaman Gen Z terhadap mekanisme Pemilu menunjukkan bahwa akses informasi yang luas belum diikuti oleh pemahaman substantif mengenai sistem politik yang berlaku.

Hasil word cloud dari analisis NVivo 12 menunjukkan dominasi kata-kata seperti 'pemilu', 'pemerintah', 'politik', dan 'pemilih', yang mengindikasikan bahwa pengetahuan Gen Z masih terbatas pada konsep-konsep dasar tanpa pemahaman yang lebih luas mengenai sistem politik secara keseluruhan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Karolčík dkk. (Karolčík et al., 2025) yang mengidentifikasi sepuluh elemen literasi politik esensial dalam pendidikan kewarganegaraan, di antaranya pengetahuan tentang hak asasi manusia, konstitusi, serta partisipasi dalam pemilu. Rendahnya penguasaan Gen Z terhadap elemen-elemen dasar tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai politik melalui jalur pendidikan formal belum berjalan optimal.

3.1.2. Keterampilan Partisipatif

Pada dimensi keterampilan partisipatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa Gen Z di Kabupaten Barito Kuala cenderung bersikap pasif dalam kegiatan politik formal. Sebagian besar responden hanya aktif menyampaikan pendapat melalui media sosial dan belum banyak terlibat dalam organisasi, forum diskusi, musyawarah, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Rendahnya keterampilan partisipatif Gen Z di Barito Kuala sejalan dengan temuan Saud dkk. (2023) dalam studi komparatif antara Indonesia dan Pakistan. Mereka menemukan bahwa meskipun media digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kaum muda, keterlibatan tersebut sering kali bersifat dangkal dan tidak ditopang oleh kompetensi kewarganegaraan yang memadai. Kaum muda cenderung aktif di ruang digital semata, namun belum mampu menerjemahkan keterlibatan daring tersebut ke dalam aksi politik yang nyata dan bermakna.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kesbangpol yang menyatakan bahwa keterlibatan Gen Z dalam kegiatan musyawarah warga, voting, atau kampanye sosial yang difasilitasi Kesbangpol belum pernah dilakukan karena keterbatasan anggaran. Sementara itu, Ketua KPU menyatakan bahwa Gen Z pernah disimulasikan cara memilih dalam pemilu, penghitungan suara, dan proses kampanye, namun kegiatan ini belum rutin dan belum menjangkau seluruh Gen Z di Barito Kuala. Tingkat kehadiran pemilih pemula di Barito Kuala pada Pemilu 2024 hanya mencapai 62%, lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Dalam perspektif Bernard Crick (2000), keterampilan partisipatif tidak hanya diukur dari keikutsertaan dalam pemungutan suara, tetapi juga kemampuan individu untuk terlibat dalam forum diskusi, musyawarah, organisasi, dan aktivitas sosial yang berkaitan dengan kepentingan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z masih memposisikan diri sebagai konsumen informasi politik, bukan sebagai aktor yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dimensi keterampilan partisipatif masih berada pada tingkat yang relatif rendah.

Fenomena rendahnya keterampilan partisipatif Gen Z di Barito Kuala sejalan dengan pola yang ditemukan oleh Wahyuningroem dkk. (2024) dalam kajian gerakan digital pemuda Indonesia. Meski Gen Z mampu memobilisasi dukungan secara daring melalui tagar dan kampanye media sosial, keterlibatan mereka dalam forum politik formal dan musyawarah warga tetap rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa akses digital belum secara otomatis menghasilkan keterampilan partisipatif yang substantif dalam demokrasi deliberatif.

3.1.3. Sikap Kritis dan Kesadaran Sosial

Pada dimensi sikap kritis dan kesadaran sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Gen Z dalam menganalisis informasi politik masih tergolong rendah. Sebagian besar responden

memperoleh informasi dari media sosial, namun tidak melakukan proses verifikasi secara memadai, menyebabkan mereka rentan terhadap hoaks dan propaganda politik.

Menurut Bernard Crick (2000), sikap kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara rasional sebelum menerima atau menyebarkannya kepada orang lain. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian Gen Z masih rentan terhadap pengaruh hoaks dan propaganda politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis sebagai salah satu komponen utama literasi politik belum berkembang secara optimal.

Kesadaran sosial Gen Z juga menunjukkan kecenderungan rendah, tercermin dari minimnya kepedulian terhadap isu-isu publik di lingkungan sekitar. Mereka lebih banyak memperhatikan isu yang sedang viral dibandingkan masalah yang terjadi di lingkungan lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi sikap kritis dan kesadaran sosial sebagaimana dikemukakan Bernard Crick belum terbentuk secara kuat.

3.2. Langkah Strategis Literasi Politik Bagi Gen Z dalam Membangun Kesadaran Politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kesbangpol dan KPU serta survei terhadap Gen Z yang dianalisis menggunakan NVivo 12, dirumuskan tiga langkah strategis utama:

Strategi pertama adalah penguatan edukasi politik berbasis kurikulum dan teknologi digital. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat indikator pemahaman mengenai lembaga politik, proses politik, hak dan kewajiban politik, serta sistem politik dan tata negara. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan literasi politik ke dalam kurikulum yang kontekstual dan relevan, serta menghadirkan konten edukasi politik yang menarik melalui platform digital populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Penguatan kualitas pendidikan politik di sekolah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda.

Alscher dkk. (2022) dalam penelitiannya terhadap siswa di Jerman menemukan bahwa kualitas pengajaran dalam pendidikan kewarganegaraan, khususnya melalui iklim kelas yang terbuka dan aktivasi kognitif, secara signifikan meningkatkan minat dan pengetahuan politik siswa, yang pada gilirannya mendorong kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi materi literasi politik ke dalam kurikulum yang kontekstual dan relevan bagi Gen Z di Kabupaten Barito Kuala.

Kondisi serupa telah diidentifikasi oleh Athahirah (2025) dalam penelitiannya di Kabupaten Purwakarta, yang menemukan bahwa partisipasi politik laten pemilih pemula masih sangat terbatas, sebagian besar hanya tertarik pada diskusi isu politik tanpa berlanjut pada keterlibatan aktif. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya literasi politik bukan semata persoalan akses informasi, melainkan juga ketiadaan strategi sosialisasi yang terstruktur dan rutin dari KPU maupun partai politik, sehingga pemilih pemula tidak terarah untuk berpartisipasi secara manifes dalam proses demokrasi.

Strategi kedua adalah penerapan pembelajaran politik berbasis pengalaman (*experiential learning*). Implementasi dapat dilakukan melalui simulasi pemilu, role play lembaga politik, forum diskusi pemuda, debat publik, hingga program Duta Politik Gen Z. Melalui kegiatan tersebut, Gen Z memperoleh pengalaman langsung mengenai proses demokrasi sehingga tidak hanya memahami politik secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya.

Permasalahan serupa ditemukan oleh Septiana & Mulyana (2023) yang meneliti program sosialisasi KPU Kota Cilegon bagi pemilih pemula. Sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui media sosial dan radio lokal belum menjangkau seluruh segmen pemilih pemula, dan ketiadaan program tatap muka akibat pandemi COVID-19 semakin memperlemah efektivitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis digital saja tidak cukup tanpa didukung oleh pendekatan langsung yang bersifat partisipatif dan *experiential.*

Strategi ketiga adalah penguatan literasi media dan pengembangan ruang diskusi interaktif. Strategi ini bertujuan memperkuat kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi isu publik, dan membuat keputusan rasional. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui pelatihan cek fakta, workshop literasi digital, forum diskusi isu publik, kampanye anti-hoaks, dan ruang dialog antara pemerintah dengan generasi muda.

Tabel 1.
Langkah Strategis Literasi Politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala

Dimensi	Permasalahan	Strategi Pemerintah	Implementasi
Pengetahuan Politik	Pemahaman masih sebatas istilah umum, belum mendalam	Penguatan edukasi politik berbasis kurikulum dan digital	Integrasi materi literasi politik di sekolah, konten edukasi di media sosial, platform informasi politik lokal
Keterampilan Partisipatif	Gen Z cenderung pasif dan hanya aktif di media sosial	Pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning)*	Simulasi pemilu, role play lembaga politik, forum diskusi pemuda, program duta politik Gen Z
Sikap Kritis & Kesadaran Sosial	Rendahnya kemampuan verifikasi informasi dan kepedulian sosial	Penguatan literasi media dan diskusi interaktif	Pelatihan cek fakta, diskusi isu publik, kampanye anti-hoaks, ruang dialog terbuka

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2026

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala masih berada pada kategori rendah hingga sedang pada ketiga dimensi yang dikemukakan Bernard Crick (2000).

Pada dimensi pengetahuan politik, rendahnya pemahaman Gen Z terhadap mekanisme kelembagaan dan proses pemilu sejalan dengan temuan Anisti dkk. (2024) yang menyatakan bahwa kedekatan Gen Z dengan teknologi tidak otomatis membuat mereka memiliki literasi politik yang tinggi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Bakti dkk. (2024) yang menemukan tantangan serupa pada remaja di Barito Kuala terkait literasi digital dan pemahaman politik.

Pada dimensi keterampilan partisipatif, temuan Amin dkk. (2025) terhadap 500 mahasiswa Gen Z di Sumatera Utara relevan untuk menjelaskan kondisi di Barito Kuala: kesadaran politik (*political awareness*) berperan sebagai variabel moderasi yang menentukan sejauh mana akses teknologi digital benar-benar mendorong partisipasi politik. Tanpa kesadaran politik yang memadai, akses digital yang tinggi pada Gen Z Barito Kuala justru menghasilkan partisipasi yang dangkal sebatas berbagi dan mengomentari isu di media sosial, tanpa berlanjut pada keterlibatan dalam musyawarah, organisasi, atau forum diskusi formal.

Temuan ini sejalan dengan keberhasilan yang mampu meningkatkan pemahaman 89% peserta melalui kegiatan pengabdian intensif berbasis pengalaman langsung; perbedaannya, program sosialisasi yang berjalan di Barito Kuala masih bersifat satu arah dan belum memberikan ruang praktik serupa, sehingga keterampilan partisipatif Gen Z belum terbentuk meskipun pengetahuan dasar telah disampaikan.

Pada dimensi sikap kritis dan kesadaran sosial, tingginya ketergantungan pada media sosial tanpa verifikasi sejalan dengan penelitian Aziz dan Widodo (2022) yang menemukan pengaruh media sosial

sebesar 64,1% terhadap literasi politik Gen Z. Namun, jika pada penelitian Aziz dan Widodo pengaruh tersebut bersifat positif terhadap literasi, pada konteks Barito Kuala justru sebaliknya: tingginya keterpaparan media sosial tanpa diimbangi keterampilan verifikasi (sebagaimana ditunjukkan oleh 42% Gen Z yang kesulitan membedakan berita asli dan hoaks) menjadikan media sosial sebagai sumber kerentanan, bukan sumber penguatan literasi.

Hal ini menegaskan bahwa ketiga dimensi literasi politik Crick bersifat saling bergantung rendahnya pengetahuan politik dan keterampilan partisipatif pada akhirnya menghambat terbentuknya sikap kritis dan kesadaran sosial yang matang, sehingga strategi peningkatan literasi politik harus menyasar ketiga dimensi tersebut secara simultan, bukan parsial.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari wilayah luas dengan akses internet yang tidak merata menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi rendahnya literasi politik Gen Z. Tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga pendekatan offline melalui forum pemuda di desa, diskusi komunitas, atau kegiatan yang melibatkan karang taruna tetap diperlukan di samping strategi digital.

Selain itu, keterbatasan anggaran sosialisasi yang hanya memungkinkan satu kali kegiatan khusus Gen Z per tahun oleh Kesbangpol menjadi hambatan struktural yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran daerah ke depan.

Temuan penelitian mengenai ketimpangan akses internet di Barito Kuala yang memengaruhi literasi politik Gen Z diperkuat oleh kajian Matutina & Fahlevvi (2025) di Kabupaten Sorong. Mereka menemukan paradoks literasi digital, di mana skor indeks literasi yang relatif tinggi pada generasi muda tidak sejalan dengan rendahnya adopsi layanan digital pemerintah. Hal ini disebabkan oleh blokade infrastruktur dan defisit kepercayaan kelembagaan yang menciptakan frustrasi partisipasi (*frustrated agency*) bagi generasi muda, kondisi yang analog dengan tantangan yang dihadapi Gen Z di Barito Kuala.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan penguatan sekaligus perluasan terhadap konsep literasi politik Bernard Crick (2000). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya akses informasi politik melalui media digital tidak secara otomatis meningkatkan literasi politik secara menyeluruh. Meskipun Gen Z memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi politik, peningkatan pengetahuan politik belum selalu diikuti oleh peningkatan keterampilan partisipatif dan sikap kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks generasi digital, ketiga dimensi literasi politik Crick harus dikembangkan secara simultan agar mampu menghasilkan kesadaran politik yang lebih matang.

Pola rendahnya partisipasi pemilih akibat keterbatasan sosialisasi dan apatisme politik bukan hanya fenomena di Barito Kuala. Santoso & Mulyana (2023) menemukan hal yang sama di Kota Balikpapan, di mana hanya 59% pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020.

Faktor utamanya meliputi kekecewaan terhadap calon tunggal, dampak pandemi, dan kurangnya inovasi KPU dalam sosialisasi terutama di era digital. Temuan ini menguatkan argumen bahwa keterbatasan sosialisasi politik yang kontekstual dan adaptif merupakan hambatan struktural yang berulang dalam berbagai daerah di Indonesia.

Pola rendahnya partisipasi pemilih akibat minimnya sosialisasi yang efektif bukan hanya terjadi di satu daerah saja. Arif & Mulyana (2020) menemukan hal serupa dalam studi Pilkada Serentak 2018 di Kota Ternate, di mana partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena banyak pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya pemahaman politik, ketimpangan status sosial-ekonomi, serta sosialisasi KPU yang belum mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata.

Karakteristik geografis dan sosial Kabupaten Barito Kuala turut membedakannya dari daerah lain yang menjadi rujukan komparasi dalam penelitian ini. Berbeda dengan Kabupaten Sorong

(Matutina & Fahlevvi, 2025) yang menghadapi kendala infrastruktur digital di kawasan pegunungan dan kepulauan, Barito Kuala merupakan wilayah dataran rendah berawa yang tersebar pada 17 kecamatan dengan kepadatan penduduk relatif rendah, sehingga tantangan utamanya bukan pada ketiadaan jaringan, melainkan pada pemerataan jangkauan program sosialisasi yang selama ini terkonsentrasi di sekitar pusat pemerintahan Kecamatan Marabahan.

Dibandingkan dengan Kota Balikpapan (Santoso & Mulyana, 2023) dan Kota Ternate (Arif & Mulyana, 2020) yang berkarakter perkotaan dengan akses sosialisasi tatap muka yang relatif lebih mudah, kondisi geografis Barito Kuala yang agraris-perairan menjadikan pendekatan berbasis komunitas desa, seperti forum karang taruna dan musyawarah desa, sebagai saluran yang secara struktural lebih realistis dibandingkan mengandalkan sosialisasi terpusat semata.

IV. KESIMPULAN

Pertama, hasil penelitian menjawab rumusan masalah pertama bahwa literasi politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala masih berada pada kategori rendah hingga sedang pada ketiga dimensi Bernard Crick (2000): pengetahuan politik masih bersifat pengenalan dasar dan belum mencakup pemahaman fungsi kelembagaan; keterampilan partisipatif masih terbatas pada aktivitas digital pasif; serta sikap kritis dan kesadaran sosial masih rendah karena minimnya kemampuan verifikasi informasi.

Kedua, sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua, penelitian ini merumuskan tiga langkah strategis yang saling terkait dengan ketiga dimensi tersebut: (1) penguatan edukasi politik berbasis kurikulum dan teknologi digital untuk dimensi pengetahuan politik; (2) penerapan pembelajaran politik berbasis pengalaman (*experiential learning*) untuk dimensi keterampilan partisipatif; dan (3) penguatan literasi media dan ruang diskusi interaktif untuk dimensi sikap kritis dan kesadaran sosial.

Ketiga, kontribusi utama penelitian ini terletak pada model strategi yang memetakan secara eksplisit hubungan antara permasalahan pada tiap dimensi literasi politik Gen Z dengan strategi dan bentuk implementasi yang dapat dijalankan pemerintah daerah (Tabel 1), serta pada temuan bahwa hambatan utama peningkatan literasi politik Gen Z di Kabupaten Barito Kuala bersifat struktural keterbatasan anggaran sosialisasi dan kondisi geografis lintas-kecamatan dan bukan semata persoalan minat generasi muda terhadap politik. Keberhasilan implementasi ketiga strategi tersebut memerlukan kolaborasi multi-pihak antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal secara berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat relevansi konsep literasi politik Bernard Crick dalam konteks Generasi Z di era digital, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategi peningkatan literasi politik yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan penyelenggara pemilu dalam membangun kesadaran politik generasi muda.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden (30 orang) dan hanya berfokus pada dua lembaga pemerintah sebagai informan. Penelitian juga dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga belum dapat menangkap dinamika perubahan literasi politik secara longitudinal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyarankan penelitian lanjutan dengan memperluas fokus pada peran media sosial dan konten digital dalam membentuk literasi politik Gen Z. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi variasi antara platform digital serta menganalisis faktor-faktor demografis yang mempengaruhi cara Gen Z menerima dan menyebarkan informasi politik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Astika Ummy Athahirah, S.STP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi. Terima kasih kepada Abdul Gani Majedi, S.IP., MM (Sekretaris Kesbangpol Kab. Barito Kuala) dan Rusdiansyah, S.P. (Ketua KPU Kab. Barito Kuala) yang telah memberikan kesempatan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alscher, P., Ludewig, U., & McElvany, N. (2022). Civic Education, Teaching Quality and Students' Willingness to Participate in Political and Civic Life: Political Interest and Knowledge as Mediators. *Journal of Youth and Adolescence*, *51*(10), 1886–1900. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01639-9

Amin, M., Ritonga, A. D., Situmorang, T. P., & Santoso, A. D. (2025). Revolutionizing political participation: a modified UTAUT model for generation Z in the digital era. *Frontiers in Political Science*, *7*. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1681050

Anisti, Sidarta, V., Imran, M., & Syatir. (2024). Tantangan Literasi Digital Generasi Z: Kajian Systematic Literature Review. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, *30*(2), 152–161. https://doi.org/10.33751/wahana.v30i2.11870

Arif, M., & Mulyana, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *46*(2), 381–395. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i2.1406

Athahirah, A. U., & Ramadhoni, I. (2025). Model Perilaku Politik Pemilih Gen-Z Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja …*, *15*(1), 73–88. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v15i1.5214

Aziz, A., & Widodo, B. (2022). Pengaruh Media Sosial Sebagai Sumber Pengetahuan Politik Generasi Z Terhadap Literasi Politik Pada Pemilu 2020. *Proceedings Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference*, *2*(1), 87–98. https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.424

Bakti, K., Bangsawan, T. A., Adriansyah, M. E., Munggaran, R. R., Aji, R. S., & Kusbandiah, A. (2024). Pengelolaan Program Edukasi Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Bullying dan Penyebaran Hoaks: Perspektif Manajemen dan Politik di SMPN 5 Cibadak. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(3), 147–155. https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i3.1483

Chen, Q., & Khoso, A. R. (2025). Evaluating the Effects of Ideological and Political Education on Civic Engagement and Social Behavior among University Students: A Case Study of Sindh Agriculture University Tandojam, Pakistan. *SAGE Open*, *15*(4), 1–15. https://doi.org/10.1177/21582440251365400

Crick, B. (2000). *Essays on Citizenship*. Continuum.

Hardyansyah, R. P., & Sobari, W. (2024). Pengaruh Gimmick Politik Prabowo Gibran di Tiktok Terhadap Keputusan Memilih Generasi Z Pemilih Pemula pada Pilpres 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(2), 1167–1177. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3200

Hasna, A. N., & Candrasari, Y. (2023). Terpaan Informasi Politik Pada Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Mengembangkan Literasi Politik Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(21), 146–152. https://doi.org/10.5281/zenodo.10074046

Karolčík, Š., Steiner, J., & Čipková, E. (2025). Politics and political literacy in education from the perspective of the public. *Cogent Education*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457560

Matutina, E. J. B., & Fahlevvi, M. R. (2025). Kesenjangan Generasi dan Geografis dalam Literasi Digital: Implikasinya terhadap Kebijakan E-Government di Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *7*(2), 201–216. https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771

Santoso, A. H., & Mulyana, M. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *49*(1), 89–101. https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3356

Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, *97*, 101904. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101904

Septiana, L., & Mulyana, M. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 91–105. https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3555

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, *12*, 543. https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3